

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama pemerintah dalam menjalankan pembangunan nasional dan menjaga stabilitas perekonomian negara. Pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah menjadi sumber utama pembiayaan belanja negara untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah (Melissa & Ariffin, 2007). Pajak masih menjadi penyumbang terbesar dalam struktur penerimaan negara karena digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Selain pajak, PNBP dan hibah juga memiliki peranan penting dalam mendukung kapasitas fiskal negara, terutama ketika penerimaan perpajakan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja negara (Sulistyowatie & Amelia, 2020).

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, Indonesia masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap kondisi perekonomian global. Ketergantungan tersebut terlihat dari pengaruh perdagangan internasional, harga komoditas dunia, investasi asing, dan kondisi ekonomi global terhadap penerimaan negara Indonesia. Ketika harga komoditas dunia mengalami penurunan atau terjadi perlambatan ekonomi global, maka penerimaan negara terutama yang berasal dari sektor perpajakan dan PNBP ikut terdampak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas penerimaan negara Indonesia belum sepenuhnya terlepas dari dinamika ekonomi dunia sehingga mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam merealisasikan belanja negara secara optimal (Purnomo, 2025)

Ketergantungan Indonesia terhadap sektor sumber daya alam juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penerimaan negara mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. PNBP yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam sangat dipengaruhi oleh perubahan harga komoditas global seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan mineral lainnya (Putra, 2023). Ketika harga komoditas meningkat, penerimaan negara mengalami kenaikan, namun ketika harga komoditas turun maka penerimaan negara juga mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan penerimaan negara, khususnya PNBP, memiliki kondisi yang fluktuatif sehingga berdampak terhadap kestabilan pembiayaan belanja negara dalam APBN (Nersiwad, 2021).

Penerimaan perpajakan sebagai sumber utama pendapatan negara juga masih menghadapi berbagai tantangan dalam pencapaian target APBN. Rendahnya tax ratio, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta perlambatan ekonomi menjadi faktor yang menyebabkan penerimaan pajak belum optimal (Nasution & Hasibuan, 2024). Selain itu, kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi beberapa tahun terakhir turut memberikan tekanan terhadap penerimaan negara sehingga target penerimaan pajak sering kali tidak tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah. Ketidakstabilan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan negara Indonesia masih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi baik domestik maupun global (Sulistyowatie & Amelia, 2020).

Tidak tercapainya target penerimaan negara dapat berdampak langsung terhadap realisasi belanja negara. Belanja negara memiliki fungsi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta program perlindungan sosial masyarakat (Rahmawati, 2025). Ketika penerimaan negara mengalami penurunan atau tidak

mencapai target, pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi belanja negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Oleh karena itu, kestabilan penerimaan pajak, PNB, dan hibah menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pelaksanaan program pemerintah melalui APBN (Khairiyah & Akhmadi, 2018).

Table 1. 1 Penerimaan Pajak, PNB dan Hibah tahun 2005-2025 (Milyar Rupiah).

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Penerimaan Hibah
2005	347.031	146.888	1.33
2006	490.203	226.950	1.83
2007	490.988	215.120	1.697,7
2008	658.701	320.604	2.304
2009	619.922	227.174	1.666,6
2010	723.307	268.942	3.023
2011	873.874	331.472	5.253,9
2012	980.518,1	351.804,7	5.786,7
2013	1.077.306,7	354.751,9	6.832,5
2014	1.146.865,8	398.590,5	5.034,5
2015	1.240.418,86	2.556.28,48	11.973,04
2016	1.284.970,1	261.976,3	8.987,7
2017	1.343.529,8	311.216,3	11.629,8
2018	1.518.789,8	409.320,2	15.564,9
2019	1.546.141,9	408.994,3	5.497,3
2020	1.285.136,32	343.814,21	18.832,82
2021	1.547.841,1	458.493	5.013
2022	2.034.552,5	595.594,5	5.696,1
2023	2.154.208	612.537	17.184
2024	2.309.859,8	492.003,1	430,6
2025	2.387.281,8	477.227,9	992

Sumber: Badan Pusat Statistik

Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh penerimaan pajak, PNB, dan hibah terhadap realisasi belanja negara menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kontribusi masing-masing sumber penerimaan dalam mendukung

pembiayaan negara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi realisasi belanja negara. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan guna meningkatkan stabilitas keuangan negara dan mendukung pembangunan nasional.

Dalam pengelolaan keuangan negara Indonesia menunjukkan bahwa realisasi belanja negara sangat dipengaruhi oleh dinamika penerimaan pajak, PNBP, dan hibah yang cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Data APBN periode 2005-2025 menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun target penerimaan negara tidak tercapai (*shortfall*), terutama pada saat terjadi krisis ekonomi global tahun 2008 dan pandemi COVID-19 tahun 2020-2021, yang menyebabkan penurunan signifikan pada penerimaan pajak akibat melemahnya aktivitas ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2025). Di sisi lain, PNBP yang sebagian besar berasal dari sektor sumber daya alam juga mengalami volatilitas tinggi karena sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas dunia seperti minyak, gas, dan batu bara, sehingga kontribusinya terhadap pembiayaan belanja negara menjadi tidak stabil (Nasution & Hasibuan, 2024)

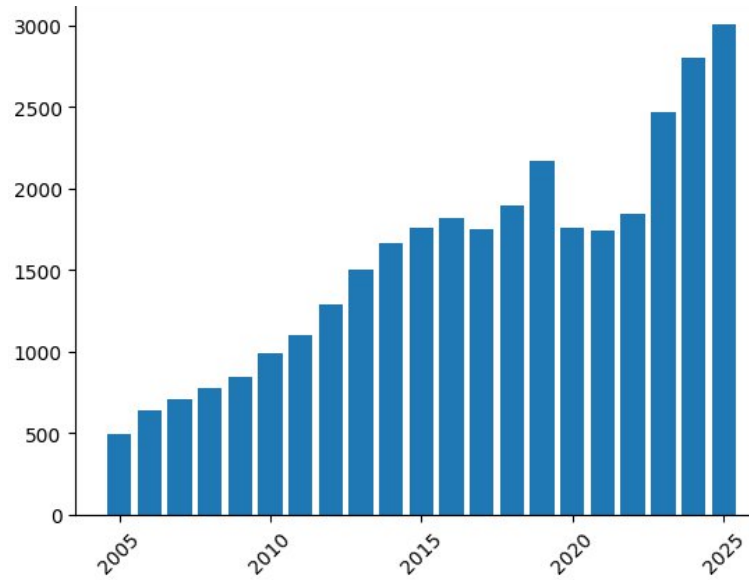
Sementara itu, hibah memiliki kontribusi yang relatif kecil dan tidak pasti karena bergantung pada komitmen pihak eksternal, sehingga tidak dapat diandalkan sebagai sumber utama pembiayaan negara. Kondisi tersebut menyebabkan realisasi belanja negara sering kali harus disesuaikan dengan kemampuan penerimaan yang tersedia, bahkan dalam beberapa kasus mendorong peningkatan defisit anggaran dan pembiayaan melalui utang. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap faktor eksternal dan belum optimalnya pengelolaan sumber penerimaan domestik menjadi tantangan

utama dalam menjaga stabilitas fiskal dan efektivitas realisasi belanja negara di Indonesia (Studi *et al.*, 2022).

Menunjukkan bahwa struktur penerimaan negara Indonesia masih menghadapi ketidakseimbangan antara potensi dan realisasi yang berdampak langsung pada pelaksanaan belanja negara. *Tax ratio* Indonesia yang relatif rendah dibandingkan negara berkembang lainnya mencerminkan bahwa kapasitas penerimaan pajak belum optimal, sehingga ruang fiskal pemerintah menjadi terbatas dalam membiayai berbagai program pembangunan (Kurnia *et al.*, 2022). Selain itu, ketergantungan terhadap sektor komoditas dalam PNBP menyebabkan penerimaan negara sangat rentan terhadap gejolak eksternal, seperti penurunan harga minyak dan batu bara yang pernah terjadi dalam beberapa periode, sehingga memengaruhi stabilitas pendapatan negara.

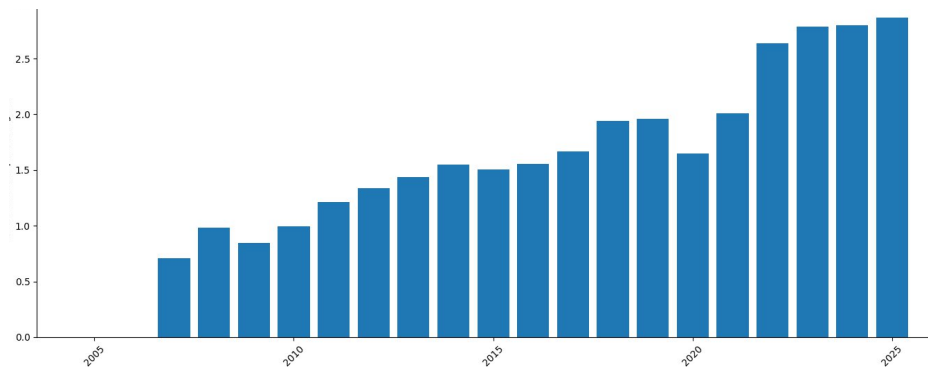
Tidak tercapainya target APBN menunjukkan adanya hubungan yang penting antara penerimaan pajak, PNBP, dan hibah terhadap realisasi belanja negara. Ketika penerimaan negara meningkat, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas belanja negara. Sebaliknya, ketika penerimaan negara mengalami penurunan, pemerintah perlu melakukan efisiensi dan penyesuaian terhadap belanja negara. Oleh karena itu, pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara secara optimal menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga stabilitas fiskal dan keberhasilan pembangunan nasional (Rohmah & Okfitasari, 2023)

Gambar 1. 1 Target Pendapatan Negara tahun 2005-2025 Milyar Rupiah).



Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 1. 2 Realisasi Pendapatan Negara tahun 2005-2025 Milyar Rupiah).



Sumber: Kementerian Keuangan

Akibat asumsi makroekonomi yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan, seperti pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari target atau nilai tukar yang berfluktuasi tajam. Kondisi ini mengakibatkan adanya kesenjangan antara rencana dan realisasi penerimaan negara, yang pada akhirnya berdampak pada penyesuaian belanja negara, baik melalui pengurangan anggaran maupun

penundaan program pembangunan). Selain itu, kebijakan fiskal seperti pemberian insentif pajak pada masa krisis, meskipun bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, justru menekan penerimaan negara dalam jangka pendek dan memperbesar defisit anggaran (Rosyadi, 2024)

Indonesia masih mengalami fluktuasi, sedangkan kebutuhan belanja negara terus meningkat setiap tahunnya. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, perubahan harga komoditas dunia, rendahnya stabilitas penerimaan perpajakan, serta ketergantungan PNBPN terhadap sektor sumber daya alam. Di sisi lain, pemerintah tetap harus meningkatkan belanja negara untuk membiayai pembangunan nasional, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial masyarakat. Kondisi ini menimbulkan permasalahan fiskal karena peningkatan belanja negara tidak selalu diikuti dengan peningkatan penerimaan negara yang stabil (Putra, 2023)

Secara empiris, penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara masih sering tidak mencapai target APBN akibat perlambatan ekonomi dan rendahnya tax ratio Indonesia. Selain itu, penerimaan PNBPN juga cenderung berfluktuasi karena sangat dipengaruhi oleh harga komoditas global seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Namun pada saat yang sama, realisasi belanja negara terus mengalami peningkatan karena pemerintah dituntut untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Perbedaan kondisi antara penerimaan negara yang tidak stabil dan belanja negara yang terus meningkat inilah yang menjadi fenomena penting untuk diteliti lebih lanjut (Mulyati *et al.*, 2022).

Berdasarkan perspektif teoritis, teori keuangan negara menjelaskan bahwa penerimaan negara memiliki peranan utama dalam mendukung pembiayaan

pengeluaran pemerintah. Semakin besar penerimaan negara yang berasal dari pajak, PNBPN, dan hibah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam merealisasikan belanja negara untuk pembangunan nasional. Akan tetapi, apabila penerimaan negara mengalami ketidakstabilan atau tidak mencapai target APBN, maka pemerintah berpotensi mengalami defisit anggaran dan harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi belanja negara. Oleh karena itu, hubungan antara penerimaan pajak, PNBPN, dan hibah terhadap realisasi belanja negara menjadi penting untuk dianalisis guna mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing sumber penerimaan negara terhadap pelaksanaan APBN (Ujang Enas, *et al.*, 2023).

Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui teori keuangan publik yang menekankan pentingnya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara dalam menjaga stabilitas fiskal. Dalam pandangan (Musgrave, 1959), fungsi stabilisasi mengharuskan pemerintah mampu mengelola kebijakan fiskal secara efektif agar tidak terjadi defisit yang berlebihan akibat ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja negara. Selain itu, teori fungsi pajak oleh (Wagner, 1883) menyatakan bahwa seiring meningkatnya aktivitas pemerintah, kebutuhan pembiayaan negara juga akan meningkat, sehingga penerimaan pajak harus mampu berkembang secara optimal untuk mendukung pengeluaran negara.

Di sisi lain, teori *Revenue Dominial* yang dikemukakan oleh (Pigou, 1920) menjelaskan bahwa negara tidak hanya bergantung pada pajak, tetapi juga pada penerimaan lain seperti PNBPN dan pengelolaan aset negara sebagai sumber pembiayaan tambahan. Namun, dalam praktiknya, ketergantungan terhadap sumber penerimaan yang bersifat fluktuatif seperti PNBPN dan hibah justru dapat menimbulkan ketidakstabilan fiskal apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena

itu, secara teoritis diperlukan diversifikasi sumber penerimaan serta penguatan basis pajak agar struktur keuangan negara menjadi lebih stabil dan berkelanjutan (Rizki & Hodijah, 2023).

Dengan demikian, tersebut dapat dipahami bahwa penerimaan pajak, PNBP, dan hibah memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung realisasi belanja negara. Ketidakeimbangan dalam pengelolaan ketiga sumber penerimaan tersebut akan berdampak pada ketidakstabilan fiskal, sehingga diperlukan kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna mendukung pelaksanaan belanja negara secara efektif dan berkelanjutan (Khairiyah & Akhmadi, 2018).

Pemerintah dituntut untuk mampu mengelola penerimaan dan pengeluaran secara efisien guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ketika penerimaan negara tidak stabil, maka fungsi alokasi dan distribusi tidak dapat berjalan secara optimal karena keterbatasan anggaran yang tersedia (Musgrave, 1959). Selain itu, teori elastisitas pajak juga menjelaskan bahwa penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, sehingga ketika terjadi perlambatan ekonomi, penerimaan negara cenderung menurun dan berdampak pada kemampuan pemerintah dalam membiayai belanja negara (Kurnia *et al.*, 2022).

Di sisi lain, ketergantungan ekonomi (*dependency theory*) menjelaskan bahwa negara berkembang seperti Indonesia cenderung memiliki ketergantungan terhadap faktor eksternal, baik dalam bentuk perdagangan internasional maupun penerimaan yang bersumber dari komoditas global. Ketergantungan ini menyebabkan struktur penerimaan negara menjadi rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi global, sehingga stabilitas fiskal sulit untuk dicapai secara

konsisten (Putra, 2023). Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan ekonomi domestik melalui optimalisasi pajak serta pengelolaan PNBPN yang lebih efektif agar ketergantungan terhadap faktor eksternal dapat diminimalisir.

Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan keuangan negara sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara penerimaan pajak, PNBPN, dan hibah terhadap kebutuhan belanja negara. Ketiga sumber penerimaan tersebut harus dikelola secara sinergis dan berkelanjutan agar mampu menciptakan stabilitas fiskal serta mendukung pelaksanaan pembangunan nasional secara optimal .

Meskipun berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu telah menjelaskan pentingnya peran penerimaan pajak, PNBPN, dan hibah dalam mendukung realisasi belanja negara, namun masih terdapat kesenjangan yang perlu dikaji lebih lanjut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan atau belanja negara, sementara penelitian lain menemukan bahwa kontribusi PNBPN lebih dominan pada kondisi tertentu, terutama ketika terjadi peningkatan harga komoditas global. Di sisi lain, terdapat pula penelitian yang menyatakan bahwa pengaruh kedua variabel tersebut tidak selalu konsisten karena dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, kebijakan fiskal, serta tingkat kepatuhan wajib pajak (Rahmawati, 2025).

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara penerimaan pajak, PNBPN, dan hibah terhadap realisasi belanja negara masih belum memiliki kesimpulan yang konsisten. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada pendapatan negara, sedangkan kajian yang secara khusus mengaitkan ketiga sumber penerimaan tersebut terhadap realisasi belanja

negara masih relatif terbatas. Padahal, dalam praktiknya, keberhasilan pengelolaan keuangan negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan, tetapi juga oleh bagaimana penerimaan tersebut mampu mendukung realisasi belanja secara efektif dan berkelanjutan (Putra, 2023).

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara empiris pengaruh penerimaan pajak, PNBPN, dan hibah terhadap realisasi belanja negara di Indonesia dalam periode 2005-2025. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas hubungan antar variabel, mengisi kekosongan penelitian sebelumnya, serta menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan fiskal yang lebih tepat dan berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini juga mencoba mengisi keterbatasan penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan periode pengamatan yang relatif pendek, sehingga belum mampu menangkap dinamika jangka panjang penerimaan dan belanja negara. Dengan menggunakan data time series periode 2005–2025, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola hubungan antara penerimaan pajak, PNBPN, dan hibah terhadap realisasi belanja negara dalam berbagai kondisi ekonomi, baik saat stabil maupun saat terjadi krisis (Kementerian Keuangan, 2023). Hal ini penting karena karakteristik data jangka panjang memungkinkan analisis yang lebih akurat dalam melihat kecenderungan dan fluktuasi penerimaan serta implikasinya terhadap kebijakan fiskal.

Di samping itu, mempertimbangkan bahwa peran masing-masing sumber penerimaan tidak selalu bersifat linier dan dapat berbeda dalam setiap periode. Pada kondisi tertentu, penerimaan pajak mungkin menjadi faktor dominan,

sementara pada kondisi lain PNBPN atau bahkan hibah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembiayaan belanja negara (Nugroho, 2022). Oleh karena itu, analisis empiris yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontribusi relatif masing-masing variabel dalam mendukung realisasi belanja negara.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengujian hubungan antar variabel, tetapi juga berupaya memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kondisi keuangan negara Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga stabilitas fiskal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik sekaligus masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengoptimalkan penerimaan negara guna mendukung pelaksanaan belanja negara secara berkelanjutan (Ujang Enas, *et al.*, 2023).

Mempertimbangkan adanya dinamika kebijakan fiskal yang terus berkembang sebagai respons terhadap perubahan kondisi ekonomi domestik maupun global. Kebijakan seperti reformasi perpajakan, peningkatan tarif atau perluasan basis pajak, optimalisasi PNBPN, serta pemanfaatan hibah merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas fiskal negara (Kurnia *et al.*, 2022). Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan realisasi belanja negara masih perlu diuji secara empiris, mengingat adanya berbagai kendala struktural seperti kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, fluktuasi harga komoditas, serta ketergantungan terhadap faktor eksternal.

Selain itu, pentingnya penelitian ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk memahami bagaimana ketiga sumber penerimaan negara tersebut dapat dikelola

secara sinergis dalam mendukung pembangunan nasional. Ketidakseimbangan antara penerimaan dan belanja negara tidak hanya berdampak pada defisit anggaran, tetapi juga berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik (Musgrave, 1959). Oleh karena itu, analisis yang komprehensif mengenai pengaruh penerimaan pajak, PNBPN, dan hibah terhadap realisasi belanja negara menjadi sangat penting untuk menghasilkan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, melalui pendekatan kuantitatif dan analisis data jangka panjang, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai keuangan negara, khususnya terkait hubungan antara penerimaan dan belanja negara. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara serta memperkuat ketahanan fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global (Kementerian Keuangan, 2022).

kebijakan fiskal dalam menghadapi dinamika perekonomian yang semakin kompleks, baik di tingkat domestik maupun global. Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai kebijakan strategis seperti reformasi perpajakan, optimalisasi PNBPN, serta peningkatan transparansi pengelolaan keuangan negara guna memperkuat kapasitas fiskal dan menjaga keberlanjutan pembangunan (Badan Pusat Statistik, 2025). Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam kaitannya dengan kemampuan penerimaan negara dalam mendukung realisasi belanja negara secara optimal.

Selain itu, juga didorong oleh kebutuhan untuk menjaga keseimbangan APBN agar tetap sehat dan berkelanjutan, mengingat belanja negara yang terus

meningkat tidak selalu diimbangi dengan peningkatan penerimaan yang stabil. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal yang tepat menjadi kunci dalam mengurangi defisit anggaran dan ketergantungan terhadap pembiayaan utang (Kementerian Keuangan, 2022). Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh penerimaan pajak, PNBP, dan hibah terhadap realisasi belanja negara menjadi relevan untuk memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.

Karena pentingnya optimalisasi seluruh sumber penerimaan negara dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan memahami kontribusi masing-masing sumber penerimaan terhadap belanja negara, diharapkan pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih terarah dalam meningkatkan penerimaan negara serta mengelola pengeluaran secara efisien dan tepat sasaran (Sari & Pratama, 2021). Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai strategis baik secara akademis maupun praktis dalam mendukung perumusan kebijakan fiskal yang lebih efektif di Indonesia.

Selanjutnya, pentingnya penelitian ini juga berkaitan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kemandirian fiskal guna mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal, khususnya utang. Ketika penerimaan negara dari pajak, PNBP, dan hibah dapat dioptimalkan, maka kebutuhan pembiayaan melalui utang dapat ditekan sehingga risiko fiskal di masa depan menjadi lebih terkendali (Islam & Mawhinney, 2023). Namun, realitas menunjukkan bahwa peningkatan belanja negara yang terus terjadi belum sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan penerimaan yang stabil, sehingga defisit anggaran masih menjadi tantangan dalam pengelolaan APBN.

Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tekanan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini menuntut adanya kesinambungan antara kebijakan penerimaan dan belanja negara agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan beban fiskal yang berlebihan (ADB, 2020). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana peran masing-masing sumber penerimaan negara dalam mendukung realisasi belanja negara.

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak terhadap realisasi belanja negara di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhadap realisasi belanja negara di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh hibah terhadap realisasi belanja negara di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak, PNBP, dan hibah secara simultan terhadap realisasi belanja negara di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh penerimaan pajak terhadap realisasi belanja negara di Indonesia, sehingga dapat dipahami sejauh mana kontribusi penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dalam mendukung pembiayaan belanja pemerintah serta menjaga stabilitas fiskal nasional.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhadap realisasi belanja negara di Indonesia, sehingga dapat diketahui peran PNBP sebagai sumber penerimaan alternatif dalam

menopang kebutuhan pembiayaan negara, khususnya dalam kondisi fluktuasi ekonomi dan ketidakpastian global.

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh hibah terhadap realisasi belanja negara di Indonesia, sehingga dapat dipahami sejauh mana kontribusi penerimaan hibah dalam mendukung pembiayaan belanja negara, terutama sebagai sumber pendanaan tambahan yang dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kemampuan fiskal negara dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah secara simultan terhadap realisasi belanja negara di Indonesia, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi ketiga sumber penerimaan tersebut dalam mendukung pelaksanaan belanja negara secara efektif, stabil, dan berkelanjutan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan akademis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi publik dan keuangan negara. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hibah, serta realisasi belanja negara. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik serta menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami hubungan antara sumber penerimaan negara dan pengelolaan belanja negara secara lebih komprehensif.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif, khususnya dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan kualitas pengelolaan belanja negara. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta memperkuat stabilitas fiskal guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini meliputi dua aspek utama. Pertama, keterbatasan ruang lingkup penelitian, yaitu hanya menggunakan variabel penerimaan pajak, PNPB, dan hibah sebagai variabel independen serta realisasi belanja negara sebagai variabel dependen, sehingga belum mampu menggambarkan seluruh faktor yang memengaruhi belanja negara secara menyeluruh. Kedua, keterbatasan teknis penelitian, yaitu penggunaan data sekunder yang memiliki kemungkinan adanya perbedaan pencatatan atau revisi data dari sumber resmi, serta keterbatasan peneliti dalam mengakses data yang lebih rinci. Selain itu, metode analisis yang digunakan terbatas pada teknik statistik tertentu, sehingga interpretasi hasil penelitian juga memiliki keterbatasan sesuai dengan metode yang digunakan.